

Persepsi Dan Tindakan Politik Pemuda Terhadap Gerakan Jogja Independent (JOINT) Dalam Pelaksanaan Pilwalkot Kota Yogyakarta Tahun 2017 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Pemuda (Studi Pada Relawan Jogja Independent (JOINT) di Kota Yogyakarta)

Desiana Rizka Fimmastuti

Sekolah Pascasarjana UGM

Email: desiana.rizka.f@mail.ugm.ac.id

Agus Pramusinto

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM

Email: agus_pramusinto@map.ugm.ac.id

Djoko Soerjo

Fakultas Ilmu Budaya UGM

Email: djoko98@yahoo.com

ABSTRACT

This article discussed political resilience from society perspective. Drawing on case studies of the youth's perception of independent political movement in Yogyakarta in 2017, we argued that youth's opinion and experience had contributed to strengthened youth political resilience. Political resilience can not only be seen from state centric aspect but also from the youth as part of local society.

The research method used was qualitative descriptive using case studies. Data collections was done through in-depth interviews, observations, and document analysis.

This research showed that the youths were optimistic with the existence of Jogja Independent Movement (JOINT). JOINT tried to offered an alternative way with public involvement as candidate or volunteer. The ideology, vision and mission offered by JOINT were considered as one of the alternatives for young people to actively involved in political practices without taking a part in political parties. However, they argued that the strategy and management of the movement were not well developed. Furthermore, the volunteers didn't have wide space to articulated their needs, because they involved in technical-administrative process only. Although the young people didn't have the wider space in the substantial matter, they got experience and political practical lessons in JOINT. With their belief, youth were optimist that democratic process could be done with good and clean when we had a good strategy and well preparation. Although there was many volunteers who stopped after the collapse of the movement, the knowledge gained by the volunteers stimulates them to joined a movement, initiated movement and research, and also made a plan political education in the future. Their beliefs, thoughts, and steps could be seen as a form of checks and balances in order to responded political dynamics for better development.

Keywords: Perception, Youth, Independent Political Movement, Youth Political Resilience

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketahanan politik dari sisi masyarakat, dengan mengamati persepsi para pemuda (relawan) sekaligus *political action* mereka terhadap gerakan independen di Kota Yogyakarta tahun

2017. Ketahanan politik tidak hanya dapat dikaji dari hal yang sifatnya *state centric*, namun bisa dilihat pada elemen masyarakat. Pengalaman dan pandangan *youth as active citizens* terhadap proses di dalam gerakan telah berkontribusi pada ketahanan politik pemuda.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, serta pengumpulan berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awalnya para pemuda cukup optimis dengan keberadaan gerakan Jogja Independent yang berusaha menawarkan alternatif cara baru dalam berpolitik. Ideologi, visi, dan misi yang ditawarkan oleh JOINT dianggap relevan sebagai sarana berpolitik tanpa melalui jalur partai politik. Namun mereka menilai bahwa strategi dan pengorganisasian gerakan masih kurang matang dan kurang menyoar masyarakat akar rumput. Di samping itu, para relawan juga belum memiliki ruang untuk mengakomodasi kepentingan pemuda, karena mereka hanya dilibatkan dalam teknis administratif semata. Meskipun secara substansi pemuda belum memiliki ruang sama seperti di dalam parpol, pemuda mendapatkan pengalaman dan pembelajaran berpolitik melalui gerakan. Dari sisi keyakinan, pemuda cukup optimis bahwa berpolitik dapat dilakukan dengan jalan yang bersih dan demokratis, namun hal ini tetap membutuhkan waktu dan strategi yang tepat. Meskipun tidak memungkiri bahwa banyak relawan yang justru berhenti pasca gagalnya gerakan, pengetahuan yang didapatkan dalam gerakan telah menstimulasi para relawan untuk membuat gerakan dan mengadakan edukasi politik di masa mendatang, bahkan bergabung pada gerakan politik dan mengadakan berbagai penelitian. Keyakinan, pemikiran, dan langkah konkret para pemuda merupakan bentuk dari *checks and balances* dalam merespon dinamika politik dan mengawal pembangunan yang lebih baik.

Kata Kunci: Persepsi, Pemuda, Gerakan Politik Independen, Ketahanan Politik Pemuda

PENGANTAR

Penelitian ini menganalisis ketahanan politik dari sisi masyarakat, dengan mengamati persepsi para pemuda (relawan) dan menganalisis tindakan politik mereka terhadap gerakan independen yang telah mereka ikuti. Pengalaman dan pandangan mereka terhadap proses dalam gerakan dianggap dapat berpengaruh pada ketahanan politik pemuda karena menstimulus munculnya keyakinan, pemikiran, dan langkah konkret mereka sebagai bagian dari *checks and balances* yang dilakukan pasca kegagalan gerakan dalam mengusung kandidat. Topik ini penting dielaborasi karena pertimbangan empiris maupun teoritis dalam melihat ketahanan politik pemuda, khususnya menganalisisnya dari sudut pandang masyarakat.

Ketahanan politik dimaknai sebagai kondisi dinamis dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan di bidang politik, sehingga suatu keniscayaan bahwa aspek ini dapat berkaitan dengan dinamika politik di suatu daerah. Beragam

kajian menunjukkan bahwa ketahanan politik sering dilihat dari sisi yang *state centric* sehingga wacana tentang stabilitas sistem dan tatanan politik yang kondusif menjadi suatu diskursus yang cukup dominan (Yue, 2014; DiJohn, 2010). Beberapa kajian mencoba mengkaitkannya dengan peran eksekutif dan legislatif dan sinergi antar lembaga pemerintahan (Sationo, 2010; Rifai, 2012).

Meluasnya peluang partisipasi politik pasca reformasi telah mendudukan masyarakat sebagai aktor yang dapat berkontribusi dalam sistem politik. Penelitian ini akan melihat ketahanan politik perlu dilihat pula dari sisi masyarakat, terutama dari sisi pemuda. Pada penelitian ini, pemuda diposisikan sebagai *active citizen* yang diharapkan menyadari akan hak dan kewajibannya dalam hal pembangunan wilayah, tidak terkecuali dalam bidang politik. Penelitian ini memfokuskan pada pemilihan kepala daerah (pilkada), karena pemuda dapat berpartisipasi melalui beragam cara mulai dari mencoblos hingga bergabung dalam gerakan untuk mensukseskan kandidat. Pilkada sering

dikaitkan dengan partai politik (parpol) sebagai aktor yang berkontestasi dalam memenangkan kursi kepemimpinan. Namun sejumlah studi menunjukkan adanya dilema dalam parpol mulai dari elitisme hingga oligarki parpol (Aspinall & van Klinken, 2011; Slater, 2004; Ambardi, 2009; Robinson & Hadiz, 2009; Winters, 2011).

Dilema dalam tubuh parpol mengantarkan pada munculnya gerakan politik independen salah satunya di Kota Yogyakarta. Dengan mekanisme *open recruitment*, gerakan ini dapat menjadi alternatif berpolitik bagi masyarakat yang luas, tidak terkecuali pemuda. Penelitian ini mengelaborasi tentang persepsi para pemuda tentang gerakan Jogja Independent (JOINT) dalam pelaksanaan Pilwalkot Kota Yogyakarta tahun 2017, serta bagaimana tindakan politik para pemuda. Ketertarikan ini lahir karena pemuda dalam partai politik hanya diposisikan sebagai alat untuk mendulang suara (Meiji, 2015). Para pemuda memiliki pandangan atas berbagai proses yang telah dialami dalam gerakan, mulai dari visi misi, ideologi, strategi, pemimpin dan pengorganisasian, hingga akomodasi kepentingan kepemudaan. Hal inilah yang pada akhirnya melahirkan benih *checks and balances* dari para pemuda terhadap dinamika politik lokal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan lebih spesifik menggunakan studi kasus. Peneliti melakukan wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka dalam rangka mengumpulkan data penelitian. Wawancara dilakukan kepada para relawan JOINT yang masuk berdasarkan *open recruitment*, serta para peneliti yang memiliki perhatian pada isu ini. Sedangkan observasi dilakukan terhadap aktivitas para relawan selepas berproses dalam gerakan. Tidak hanya

itu, peneliti menggunakan literatur dari buku, jurnal, laporan yang tidak dipublikasikan, artikel internet, dan berita media massa yang terkait dengan tema penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis lebih lanjut, direduksi, kemudian dituangkan dalam naskah publikasi ilmiah. Penggunaan metode ini dapat menjadi sarana untuk mengelaborasi pandangan sekaligus langkah mereka dalam mendukung ketahanan politik pemuda.

PEMBAHASAN

Jogja Independent (JOINT) Dalam Ajang Pilwalkot Kota Yogyakarta

Kemunculan gerakan politik di suatu wilayah tidaklah lepas dari konteks sosial politik yang ada di masyarakat setempat. Begitu pula dengan gerakan Jogja Independent atau disebut dengan JOINT lahir di Kota Yogyakarta yang notabene memiliki basis partai politik yang cukup kuat. Dari sisi geografis, Kota Yogyakarta terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data BPS DIY (2015) menyebutkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta memiliki IPM yang paling tinggi di antara kabupaten lainnya yakni 84,56. IPM Kulonprogo 71,52; Bantul 77,99; Gunungkidul 67,41; dan Sleman 81,2.

Tingginya IPM masyarakat Kota Yogyakarta tidak cukup untuk menggambarkan konteks sosial politik masyarakat. Sejumlah studi menunjukkan bahwa ada kaitan antara tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi dengan komitmen pada nilai-nilai demokrasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan berkorelasi dengan komitmen pada nilai-nilai dan praktek demokrasi yang relatif lebih tinggi (Przeworsky, 2000). Karakteristik masyarakat perkotaan memang memiliki akses yang luas terhadap media informasi,

sehingga telah membuat masyarakat *melek* secara politik dan cenderung memiliki pola pikir yang kritis (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2011). Hal ini nampak pada sebuah studi yang telah menunjukkan bahwa pemilih di Kota Yogyakarta secara umum merupakan pemilih yang cerdas dan kritis. Realitas tersebut tidak hanya terjadi pada masyarakat dari perguruan tinggi semata, namun pada masyarakat secara umum (PolGov UGM, 2013). Hal ini diperkuat oleh data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menunjukkan tingginya partisipasi pemilih Kota Yogyakarta pada Pilpres tahun 2014 mencapai 77,15%, disusul dengan angka partisipasi di Sleman sebesar 81,7%, Bantul sebesar 81,3%, Kulonprogo sebesar 79,3%, dan Gunungkidul sebesar 77,04%. Angka ini sudah melampaui target nasional sebesar 75% (Atmasari, 2014).

Di samping tingkat kecerdasan pemilih yang cukup tinggi, masyarakat Kota Yogyakarta masih memiliki tautan kultural dengan Kraton Yogyakarta Hadiningrat, dan di sisi lain juga terdapat kekuatan Muhammadiyah yang cukup kuat (Ula, 2012). Tidak hanya itu, setiap kecamatan di Kota Yogyakarta juga memiliki basis masa partai politik masing-masing (Daliyoto 2013). Hal ini menjadi bagian yang penting bagi berbagai pihak untuk mengambil hati masyarakat, termasuk dalam Pilwalkot. Pada penyelenggaraan Pilwalkot Kota Yogyakarta tahun 2017, terdapat berbagai nama yang nampak ingin berkompetisi baik dari jalur partai maupun jalur independen. Dari jalur independen, terdengar nama Fuad Andreago (tokoh GPK) (Setyawan, 2016) dan juga gerakan Jogja Independen (JOINT). Namun pada akhirnya hanya ada dua pasangan calon yang berasal dari koalisi partai politik yang cukup kuat

yakni Imam Priyono D Putranto - Achmad Fadli (pasangan calon nomor 1), dan Haryadi Suyuti - Heroe Poerwadi (pasangan calon nomor 2).

Kemunculan gerakan independen yang ingin berpartisipasi pada Pilwalkot tidak lepas dari konteks politik di wilayah Kota Yogyakarta. Pemimpin setempat dianggap tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena adanya kontrak politik yang dibuat dengan parpol. Kegelisahan tersebut yang memantik munculnya gerakan independen yang menginginkan pencalonan kandidat yang lebih terbuka dan bebas dari mahar politik. Gerakan yang dideklarasikan pada 20 Maret 2016 ini diinisiasi oleh tujuh orang yang memiliki kekhawatiran akan kondisi Kota Yogyakarta yang semakin jauh dari kata ideal. Ketujuh orang tersebut adalah Edi Purjanto, Ong Hariwahyu (seniman dan penggerak masyarakat kebudayaan), Grek Wuryanto (dosen UKDW), Rifki Fauzi (aktivis bisnis *advertising*), Arif Budiman (aktivis dan bisnis *advertising*), Herman Dody (motivator dan konsultan komunikasi), Yustina Neni (seniman) (31 Oktober 2016). Ketujuh inisiator tersebut kemudian mengajak berbagai pihak untuk bergabung dan membentuk sebuah gerakan kerelawanan politik untuk mengusung calon walikota tanpa melalui jalur partai politik. Akhirnya terdapat 30 (tiga puluh) orang yang mendeklarasikan berdirinya gerakan JOINT. Deklarasi yang telah dilakukan oleh JOINT telah memunculkan landasan-landasan yang berisi kriteria-kriteria pemimpin yang diharapkan.

Dalam perjalanannya, JOINT menyusun serangkaian proses untuk penyaringan kandidat terbaik, dimulai dari pembentukan tim komite konvensi, tim 9, pengenalan kandidat, uji publik tahap 1, pra konvensi,

uji publik tahap 2, dan konvensi. Terpilihnya Garin Nugroho dan Rommy Heryanto sebagai kandidat yang diusung oleh JOINT tentu memuat konsekuensi yang harus dilakukan yaitu pengumpulan KTP sejumlah 26.374 buah yang harus diserahkan maksimal pada 6-10 Agustus 2016. Hal ini dilakukan dengan berbagai metode, baik itu melalui telepon, berkeliling, undangan kelompok kecil-kecil, hingga sedekah KTP melalui *website* (Setyawan, 2016). Pengumpulan KTP mengalami kendala karena adanya fragmentasi gerakan dengan ditandai dengan berkurangnya jumlah relawan yang aktif di JOINT, khususnya dari para mahasiswa. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, misalnya tugas perkuliahan, UAS, KKN, hingga calon yang didukung tidak lolos. Memang pada awalnya ada kesepakatan bahwa seluruh pihak akan senantiasa mendukung paslon yang lolos konvensi. Namun pada kenyataannya terjadi penurunan jumlah relawan yang signifikan. Terdapat berbagai faktor, mulai dari amanah lain, hingga karena calon yang didukung tidak lolos. Hal ini berimplikasi pada kurangnya sumberdaya manusia yang bergerak dalam pengumpulan KTP, sehingga hanya terkumpul 4.027 KTP (Hasanudin, 2016). Dengan demikian, JOINT tidak mampu mengusung Garin dan Romi dalam Pilwalkot 2017.

Kegagalan ini telah menuai berbagai pandangan terkait dengan pola pengorganisasian gerakan.

Pertama, dari sisi gerakan JOINT yang mana jumlah relawan dan pendanaan masih kurang (AB, 17 Februari 2017), karena hanya ada 15 relawan yang aktif. Berkurangnya jumlah relawan tidak hanya disebabkan karena faktor pendanaan, kajian Atsari (2016) menunjukkan bahwa ruang demokrasi yang tidak begitu terbuka untuk relawan. Hal

ini nampak dari tim yang terdapat dalam JOINT (tim 7, tim 5 dan tim 9) yang kurang memiliki koordinasi yang baik dengan relawan. Pembuatan keputusan seringkali tidak melibatkan para relawan sehingga terkesan ada jurang pemisah antara relawan dengan tim.

Kedua, dari sisi masyarakat terlihat bahwa mayoritas masyarakat belum memiliki edukasi politik yang tinggi, dan masyarakat menganggap politik tidaklah jauh dari uang (Ridho, 2016). AB menuturkan bahwa selama ia bertugas di Kotagede, tidak jarang masyarakat yang menanyakan ‘*Aku oleh opo? Aku oleh piro?*’, bahkan lebih ekstrimnya ada masyarakat yang tidak mau bertatap muka dengan tim dan menutup pintu rapat-rapat. Namun hal lain yang perlu dikritisi adalah faktor kurang dekatnya masyarakat dengan kandidat JOINT. Terdapat respon menarik ketika Hambar menggalang dukungan KTP, “Ketika kemarin di Ledok Tukangan itu, “*Saya memberikan KTP seluruh warga ini kalau kamu, tapi kalau Garin Nugroha, saya nggak memberikan*” (Hambar Riyadi, 24 Januari 2017). Hal ini menunjukkan bahwa faktor kurang dekatnya Garin dengan masyarakat sekitar menjadi pertimbangan masyarakat dalam memberikan KTP mereka.

Persepsi Pemuda Terhadap Gerakan Jogja Independent (JOINT) Dalam Ajang Pemilihan Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2017

Para pemuda yang berpartisipasi dalam gerakan JOINT telah mengalami rangkaian proses yang panjang. Para pemuda tentu memiliki pandangan atas proses yang mereka alami di dalam JOINT. Hal ini menarik untuk dielaborasi mengingat JOINT merupakan gerakan yang baru dan memiliki sistem yang

kontras jika dibandingkan dengan partai politik. Sebagaimana dipaparkan oleh Meiji (2015) menunjukkan bahwa pemuda di dalam partai politik relatif kurang memiliki kesempatan dan justru hanya menjadi alat untuk mencari suara. Untuk itu, penting nampaknya dalam melihat pemuda dalam gerakan yang mengusung tema independen dan ingin berpolitik dengan cara yang lebih baik.

Pemuda Dalam Gerakan JOINT : Antara Idealisme Dan Oportunisme

Gerakan JOINT hadir dalam rangka merespon krisis kepemimpinan yang berasal dari partai politik. Gerakan ini lahir untuk membuka peluang partisipasi publik yang luas dalam menentukan pemimpin. Untuk itulah, skema *Open recruitment* kandidat dan relawan telah membuka ruang bagi masyarakat luas, tidak terkecuali pemuda dalam berpartisipasi dalam ranah politik lokal. Tingkat inklusifitas publik yang tinggi diharapkan mampu menjadi sarana untuk menciptakan sistem kepemimpinan yang lebih akuntabel dan sesuai dengan aspirasi publik.

Dari keseluruhan kandidat yang mendaftar, setidaknya ada empat orang kandidat yang mencantumkan subjek anak muda dalam *tagline*-nya Beragam *tagline* yang diikuti dengan beragam visi dan misi senantiasa digunakan oleh para kandidat untuk menarik perhatian publik karena didasari oleh keinginannya untuk melakukan perubahan. Seperti yang diungkapkan oleh Emmy, pencalonan dirinya ke JOINT didasari atas argumentasi bahwa pemuda memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjadi pemimpin. Penuturan Hambar Riyadi menambahkan bahwa ia memiliki

cita-cita untuk melakukan perubahan di Kota Yogyakarta, dan di sisi lain ia memiliki basis yang cukup kuat terutama dari kalangan pemilih pemula dan supporter sepak bola di DIY.

Pada sisi relawan, kemunculan relawan dapat dikatakan bertahap. Misalnya ada yang ikut hanya sebentar karena ada amanah untuk KKN. NU selaku administrator web JOINT mengungkapkan bahwa lebih dari 50 orang atau sekitar 68% dari 73 relawan merupakan pemuda. Fakta inilah yang dapat menjadi salah satu bukti bahwa tingkat partisipasi pemuda dalam gerakan cukup tinggi. Hal ini juga diakui oleh Yustina Neni (31 Oktober 2016) yang memaparkan bahwa tidak sedikit pula mahasiswa yang ditugasi oleh dosen untuk bergabung dalam JOINT dalam rangka belajar demokrasi secara nyata. Para relawan melakukan kegiatan administratif hingga terjun ke lapangan untuk menggalang dukungan. Mereka sebagai *active citizen* memang memiliki semangat tinggi untuk terlibat dalam gerakan untuk menciptakan kondisi pembangunan yang ideal.

Para relawan yang mendaftar di *website* pada dasarnya terdiri dari relawan JOINT dan relawan timses. Para timses ini ada yang mendaftar sebagai relawan secara resmi pada *website* ataupun tidak. Keterbatasan jumlah relawan telah membuat relawan JOINT difokuskan pada hal yang sifatnya teknis, misalnya menjaga sekretariat, membantu proses administrasi para calon seperti penyeleksian berkas calon, dan membantu proses aktivitas JOINT (Atsari, 2016:14). Berbeda dengan relawan timses, mereka memfokuskan diri pada berbagai persiapan untuk mendukung kandidat dalam mengikuti seleksi JOINT.

Para kandidat dan relawan muda memiliki beragam motif yang

melatarbelakangi bergabungnya mereka di gerakan ini, mulai dari yang sifatnya idealis hingga oportunistis. Motif idealis rata-rata ditunjukkan oleh para pemuda yang mendaftarkan diri sebagai kandidat, salah satunya diungkapkan oleh Emmy. Emmy merupakan seorang aktivis tata kota yang ingin membawa Jogja ke arah yang lebih baik dengan mencalonkan diri. Sedangkan motif oportunistis dapat terlihat pada para relawan yang mendaftarkan diri karena faktor kedekatan maupun faktor penugasan dari dosen. Terdapat banyak relawan yang merupakan hasil dari ‘mobilisasi’ dari para dosen kepada mahasiswa untuk belajar berdemokrasi dalam gerakan ini (Yustina Neni, 31 Oktober 2016). Bergabungnya DT dalam gerakan JOINT tidak lain adalah karena faktor kedekatan dengan salah seorang kandidat (DT, 30 Maret 2017), sedangkan NU bergabung karena ada tugas dari dosen untuk melakukan penelitian tentang dinamika yang sedang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta (NU, 1 April 2017)

Beragam proses yang telah dialami para relawan dapat dikatakan menjadi stimulus yang diterima oleh para relawan untuk direfleksikan di kemudian hari. Di sinilah JOINT dapat menjadi objek pengamatan dan penilaian para relawan.

Persepsi Umum Pemuda Terhadap Gerakan Jogja Independent (JOINT)

Pemuda yang bergabung dalam gerakan ini memiliki pandangan bahwa gerakan ini merupakan suatu hal yang unik dalam rangka merespon situasi pembangunan wilayah Kota Yogyakarta. JOINT dianggap sebagai gerakan yang menawarkan alternatif baru dalam berpolitik dan dianggap mampu menawarkan sistem kaderisasi yang lebih baik dari partai

politik (Emmy Yuniarti Rusadi, 16 Februari 2017). Selain itu, JOINT dianggap dapat menjadi sarana untuk memperbaiki kondisi Kota Yogyakarta (Hambar Riyadi, 24 Januari 2017).

Meskipun JOINT membuka *open recruitment*, namun ada satu hal yang disayangkan oleh salah seorang relawan, di mana proses pemilihan kandidat nampak kurang demokratis karena penentuan kandidat tidak sepenuhnya berada di tangan publik yang menghadiri konvensi (AB, 17 Maret 2017). Kemunculan nama Garin dan Rommy sepenuhnya berada pada tim 9, karena pada saat itu 3 besar kandidat dibawa ke suatu ruangan bersama dengan tim 9 untuk musyawarah (NU, 3 April 2017).

Persepsi Pemuda Sebagai Gerakan Politik

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa gerakan JOINT tidak hanya menjadi pintu bagi partisipasi warga, namun gerakan ini sejatinya merupakan gerakan politik yang ingin berpartisipasi dalam Pilwalkot Yogyakarta tahun 2017 dengan cara yang baru. Semangat inklusivitas publik telah membawa JOINT untuk menyusun berbagai langkah dalam rangka menemukan kandidat pemimpin yang terbaik. Dalam pergerakannya, JOINT membentuk tim komite konvensi yang kelak bertugas melakukan seleksi nama-nama yang layak untuk dijadikan penyeleksi (selektorat) para kandidat yang mendaftarkan diri (Tim 5). Tim ini mencari siapa saja penyeleksi yang mau bergabung di dalam JOINT secara sukarela (Atsari, 2016:12). Pada akhirnya dihasilkanlah tim 9 yang bertugas menganalisis karakter kepemimpinan beserta visi misi para kandidat, yang terdiri dari tokoh lokal maupun nasional yang berasal dari berbagai *background* dan fokus isu.

Untuk melakukan pendaftaran, para kandidat hanya perlu menyerahkan syarat administrasi sesuai ketentuan KPU, misalnya *curriculum vitae*, visi dan misi, KTP, dan kesediaan untuk mengikuti proses kandidasi dalam gerakan JOINT. Tidak itu, JOINT membuka partisipasi bagi seluruh masyarakat yang ingin mendukung gerakan melalui *open recruitment* bagi siapapun yang ingin terlibat sebagai relawan (Atsari, 2016:11), termasuk untuk para pemuda. Setidaknya ada 15 orang nama yang mendaftarkan diri dari berbagai latar belakang profesi dan usia. Para kandidat yang telah mendaftarkan diri juga diharapkan untuk melampirkan *list* tim kecil mereka pada saat melakukan pendaftaran sebagai wujud dukungan dari kolega, kerabat dan juga kalangan di sekitarnya (Atsari 2016:11). Merekalah yang kemudian disebut relawan timses karena keberadaan mereka hanyalah untuk mendukung salah satu kandidat (NNN, 31 Maret 2017). Para kandidat yang mendaftar akan diseleksi dan melalui uji publik dalam rangka mendapatkan calon terbaik dan sesuai dengan harapan. Para kandidat juga melalui proses demi proses dalam JOINT misalnya pengenalan kandidat, uji publik tahap 1, pra konvensi, uji publik tahap 2, dan konvensi (Atsari, 2016). Pada proses ini, para relawan bertugas untuk menjadi panitia dan menyebarkan surat suara kepada masyarakat yang hadir dalam rangka memberikan penilaian terhadap kandidat (Atsari, 2016:14). Meskipun sebelumnya telah dilakukan *voting* tertutup terhadap surat suara, namun hasilnya tidak dipublikasikan kepada forum. Hanya rapat tim panelis dan tim inti JOINT yang pada akhirnya menetapkan Garin Nugroho dan Rommy Haryanto maju sebagai calon yang akan diusung oleh JOINT (AB, 17 Maret 2017).

Beragam langkah telah dilakukan JOINT untuk menyeleksi calon untuk diusung sebagai kandidat Walikota dan Wakil Walikota dari jalur independen. Jika dilakukan elaborasi secara lebih mendala, terdapat beberapa hal yang dapat diamati secara lebih mendalam terkait JOINT sebagai suatu gerakan, yakni ideologi, visi dan misi, strategi, pemimpin dan pengorganisasian gerakan. Dimensi tersebut menjadi hal yang penting dalam rangka melihat bagaimana gerakan politik dapat mencapai kepentingannya.

Dari sisi ideologi, independen menjadi hal yang tepat dalam rangka membawa Kota Yogyakarta ke arah perubahan yang lebih baik (Emmy Yuniarti Rusadi, 16 Februari 2017). JOINT dianggap memiliki nilai-nilai yang baik untuk pembangunan pada masa mendatang (DT, 30 Maret 2017). Namun masih rendahnya respon masyarakat dapat disebabkan oleh sosialisasi yang kurang mendalam terkait dengan ideologi gerakan. Penanaman ideologi menjadi penting untuk diinternalisasikan di masyarakat. Bagi salah seorang relawan, ideologi independen yang diusung oleh JOINT masih terlalu dini dan masih kurang dari sisi waktu (AB, 17 Maret 2017).

Dari sisi visi dan misi gerakan, para pemuda menilai bahwa visi dan misi JOINT dianggap mampu mengatasi permasalahan yang ada di Kota Yogyakarta, seperti maraknya pembangunan hotel, tata kota yang kurang tepat, dan sebagainya (NU, 1 April 2017). Melalui JOINT, masyarakat dapat mengajukan dirinya tanpa adanya mahar seperti yang berlaku di partai politik. Misi tersebut dapat menjadi penuntun langkah JOINT dalam mencari kandidat.

Optimisme para relawan nampaknya masih membung ketika gerakan ini masih

dalam proses kandidasi. Meskipun gerakan ini pada awalnya memiliki visi misi yang mulia, namun setelah kegagalan pencalonan kandidat telah berimplikasi pada terhentinya gerakan, bahkan tidak melakukan kegiatan lanjutan dalam rangka mengedukasi masyarakat lebih mendalam. Hal ini disayangkan oleh relawan JOINT yang masih memiliki antusiasme dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat (AB, 17 Maret 2017). Namun bagi relawan yang oportunistis, ia juga memiliki *effort* yang menurun karena kepentingannya sudah terjawab. Misalnya DT, ketika kandidat yang ia dukung gagal, ia juga berhenti berjuang. Meskipun pada awalnya sudah ada komitmen untuk saling mendukung ketika sudah ada calon yang terpilih, namun kesepakatan ini tidak dituangkan di atas hitam dan putih. Hal ini berimplikasi pada ketidakterikatan para relawan (khususnya relawan timses) pada JOINT, sehingga pergerakan JOINT mengalami perlambatan terutama dalam hal pengumpulan KTP karena banyaknya relawan yang hilang paska ditetapkannya Garin dan Rommy sebagai kandidat.

Dari sisi strategi, JOINT dianggap memiliki strategi yang cukup unik dalam menggalang dukungan, misalnya menghubungi tokoh untuk menciptakan legitimasi, *open recruitment* kandidat dan relawan, iuran, kampanye media sosial dan sebagainya. Beragam strategi ini dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan gerakan. Strategi yang dilakukan JOINT sesuai dengan visi dan misinya untuk memperbesar partisipasi publik terutama dalam pencalonan kandidat. Untuk itulah gerakan ini menggunakan strategi yang cukup transparan dan terbuka, mulai dari rekrutmen kandidat, hingga pendanaan. Pemanfaatan teknologi dianggap menjadi cara yang ampuh dalam rangka lebih mendekat

kepada masyarakat (Emmy Yuniarti Rusadi, 16 Februari 2017)

Pada awalnya para relawan diberikan pengenalan tentang JOINT dan diikuti tentang strategi yang perlu dilakukan yaitu dengan menekankan cara kreatif dan melakukan sosialisasi *door to door* (NNN, 31 Maret 2017). Penjelasan strategi yang sifatnya makro telah dilakukan oleh tim. Ada yang menindaklanjutinya dengan berpikir secara lebih kreatif, misalnya relawan timses Emmy yang membuat *Official Account Facebook* dengan berbagai *hashtag*, namun ada pula yang menilai bahwa strategi harus lebih merinci agar dapat menjadi gambaran bagi relawan untuk terjun ke lapangan.

Strategi politik yang telah dilakukan oleh JOINT dianggap belum mampu berjalan efektif dan efisien. Sistem jemput bola memang memiliki poin positif karena kandidat dapat bertatap muka dengan para *voters*, namun hal ini tentu tidak efisien dari sisi waktu. Pengalaman AB selama mengikuti kaderisasi menilai bahwa strategi JOINT yang dirumuskan masih kurang menasar ke masyarakat bawah secara langsung. Beberapa kegiatan yang dilakukan cenderung hanya dapat diakses oleh kelas menengah, misalnya diskusi dengan mahasiswa dan kampanye melalui media sosial. Sedangkan masyarakat umum masih kurang tersentuh sehingga ketika dimintai KTP cenderung resisten. Hal ini dipengaruhi pula oleh sosok kandidat yang diusung oleh gerakan ini, yakni Garin dan Rommy. Kedua sosok ini nampaknya tidak cukup kuat di mata masyarakat. Sebaiknya perlu ada cara yang lebih baik, yaitu dengan mendatangi tokoh-tokoh yang memiliki basis massa kuat dan mengadakan kegiatan yang dapat menarik perhatian publik, misalnya jalan sehat ataupun nonton bareng (Hambar Riyadi, 24 Januari 2017).

Persepsi Pemuda Terhadap Pemimpin dan Pengorganisasian Gerakan

Sebagaimana gerakan politik umumnya, JOINT memiliki pemimpin dan pengorganisasian gerakan meskipun pada dasarnya struktur organisasi ini dikelola bersama. Pada awalnya mereka berkumpul menjadi satu, dan membagi tugas karena pada dasarnya semua orang berperan sebagai relawan meski ada koordinator yang bertanggungjawab pada suatu divisi (NU, 3 April 2017).

Dalam melihat pengorganisasian gerakan, peneliti melihatnya menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal.

Pertama, ranah internal. Pada ranah internal, JOINT sering mengadakan berbagai rapat koordinasi antar bidang. Misalnya rapat pembahasan konsep dihadiri oleh para inisiator, misalnya koordinator relawan, koordinator media masa, koordinator sekretariat, dan orang-orang yang berperan penting dalam gerakan. Hasil keputusan rapat disampaikan para koordinator kepada staffnya. Di sisi lain, para relawan tidak dilibatkan secara umum dalam setiap forum rapat. Para relawan hanya mendapatkan hasil akhir rapat dan bertugas untuk melaksanakannya (AB, 17 Maret 2017). Para relawan memang dikerahkan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan internal. AB menilai bahwa pengorganisasian gerakan nampaknya kurang rapih, dan terkesan gerak sendiri-sendiri.

Kedua, ranah eksternal. Sistem koordinasi berjenjang juga diterapkan pada pihak eksternal pendukung para kandidat. Seperti yang diungkapkan oleh relawan timses Emmy, mereka mengatakan bahwa hanya ada komunikasi satu pintu kepada timses Emmy (DT, 31 Maret 2017). Jika dilakukan pengamatan, sistem koordinasi berjenjang

memiliki dimensi efisiensi yang cukup tinggi. Namun di sisi lain, sistem ini memiliki dampak kurangnya rasa memiliki antara relawan timses dengan JOINT.

Di samping dari sisi pengorganisasian gerakan, hal lain yang dapat ditangkap dari persepsi para relawan adalah pemimpin gerakan. Para relawan memiliki pandangan yang hampir sama dimana Garin dianggap kurang memiliki kedekatan dengan masyarakat umum. Garin memang memiliki popularitas, namun hanya sebatas popularitas di kalangan para seniman. Di sisi lain beliau jarang berada di Yogya karena lebih sering menghabiskan waktunya di Jakarta (AB, 17 Februari 2017)

Persepsi Pemuda Pada Akomodasi Kepentingan Kepemudaan Dalam Gerakan JOINT

Sebagai bagian dari partisipasi politik, para relawan memiliki kepentingan yang hendak diwujudkan melalui gerakan. Berkenaan dengan hal ini, akomodasi kepentingan kepemudaan dapat dilihat melalui dua cara, yaitu melalui jalur kandidat, dan melalui internal organisasi JOINT. Akomodasi kepentingan pemuda melalui jalur kandidat sejatinya bergantung pada internal tim kandidat. Pada jalur ini, aktor yang dapat mengambil peran lebih adalah para kandidat beserta relawan timses dapat menjalankan tugas yang sifatnya substantif. Dalam timses Emmy misalnya, para pemuda dapat berpartisipasi dalam merumuskan visi dan misi, *tagline*, program kerja, dan sebagainya. Misalnya pada kasus Emmy, awalnya ia menawarkan visi dan misi, kemudian dikritisi oleh para anggota komunitasnya. Di sinilah proses komunikasi terjadi pada level mikro. Sedangkan pada level makro, Emmy membuat

visi dan misi tidak lepas dari *guidelines* yang diberikan oleh JOINT (NNN, 31 Maret 2017).

Sedangkan dalam tubuh JOINT, para relawan memiliki pandangan yang sedikit berbeda dari apa yang terjadi pada agregasi yang dilakukan oleh kandidat. Para relawan JOINT pada awalnya mendaftar secara *online* dan didalam *form* tersebut memuat kepentingan atau aspirasi apa saja yang ingin dibawa oleh mereka (NU, 3 April 2017).

Penuturan NNN menunjukkan bahwa relawan dikumpulkan dan diberikan penjelasan tentang visi-misi JOINT beserta *jobdesk* teknis yang disampaikan, yakni mendapatkan suara anak muda di wilayah Kota Yogyakarta. Realitas ini juga dirasakan oleh NU, dimana ia menilai bahwa para pemuda nampaknya terpisah dalam dua hal yang berbeda, karena posisinya hanyalah sebagai *volunteer* yang rata-rata diberikan tugas oleh dosen untuk mengamati JOINT. Dengan demikian, para pemuda diposisikan hanya untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya teknis misalnya mempersiapkan forum, melakukan sosialisasi, dan mengumpulkan KTP. Mereka tidak merasa dilibatkan dari sisi substantif, sehingga secara langsung tidak memiliki akses terhadap penyuaaran aspirasi para pemuda. Aspirasi dapat mereka salurkan ketika mereka menjadi timses salah seorang kandidat, karena mereka dapat memberikan masukan pada saat perumusan visi dan misi masing-masing kandidat.

Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Pemuda

Sebagaimana diketahui bahwa ketahanan nasional tersusun atas delapan gatra, salah satunya adalah gatra politik. Berknaan dengan hal ini, diskursus ketahanan politik tidak hanya dapat dilihat dari dimensi yang

bersifat *state centric*, misalnya pentingnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif, penegakan hukum, dan sebagainya. Ketahanan politik dapat dilihat dari sisi akar rumput, dimana menilai bahwa ketahanan politik akan dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat yang kritis sehingga dapat mendukung *checks and balances* terhadap perpolitikan di ranah lokal. Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa para pemuda memiliki persepsi terhadap gerakan JOINT yang telah mereka ikuti. Mereka telah melalui berbagai proses yang panjang dan memberikan implikasi pada kesadaran individual mereka dalam merespon berbagai isu politik. Aspek ini ternyata berkontribusi dalam meningkatkan ketangguhan pemuda dalam menghadapi ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan pada masa mendatang. *Checks and balances* menjadi kata kunci yang dapat diamati dalam melihat dampak persepsi para relawan terhadap ketahanan politik pemuda dalam merespon dinamika politik di ranah lokal.

Pada dasarnya, ketahanan politik dapat diartikan suatu kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, yang sifatnya langsung maupun tidak langsung yang membahayakan kelangsungan kehidupan politik bangsa dan negara (Suradinata & Dinuth, 2001:271). Jika hal ini dikontekstualisasikan dengan kehidupan politik sehari-hari, setidaknya kehidupan politik dibagi menjadi sektor pemerintah dan sektor masyarakat. Pada suatu sistem politik, masyarakat berperan memberikan input bagi pemerintah agar mampu memprosesnya menjadi kebijakan publik

(Easton, 1957). Penelitian ini memfokuskan ketahanan politik dari sisi *input*, dengan mengkhhususkan analisis pada relawan JOINT yang masuk berdasarkan *open recruitment*, baik itu kandidat maupun relawan JOINT dan relawan timses.

Para relawan dianggap bagian dari kelompok kepentingan yang memiliki gambaran ideal pembangunan pada masa mendatang. Mereka telah berproses dan akhirnya memiliki penilaian terhadap komponen gerakan ini. Sejatinya hal ini memiliki kaitan dengan ketahanan politik para pemuda seperti pada gambar 1 berikut.

Gambar 1
Relasi Antara Persepsi Pada Gerakan Politik Independen dan Ketahanan Politik Pemuda



Sumber : Data Peneliti

Gambar 1 tersebut dapat menjelaskan relasi antara gerakan, relawan dan ketahanan politik pemuda. Beragam kegiatan di dalam JOINT secara langsung telah memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi para partisipan. Akumulasi pengetahuan dan pengalaman inilah yang dapat menstimulus timbulnya persepsi dari para relawan terhadap gerakan ini. Proses yang telah dialami para pemuda di dalam gerakan menjadi bagian yang memberikan sumbangsih pada ketahanan politik pemuda yang ditinjau dari pemikiran, keyakinan, dan langkah konkret mereka. Hal ini menjadi bagian dari *checks and balances* yang berasal dari pemuda selaku bagian dari masyarakat.

Implikasi Pada Keyakinan Pemuda Dalam Bidang Politik

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa JOINT mencoba menawarkan suatu sistem yang lebih baik. Dengan mengikuti proses demi proses dalam JOINT, Emmy secara langsung telah memahami sistem bekerjanya gerakan independen dalam menyeleksi calon pemimpin yang tepat. Berbagai mekanisme telah dilakukan untuk memastikan bahwa pemimpin memang seharusnya lahir dari masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itulah paska terlibat dalam JOINT, Emmy masih memiliki keyakinan bahwa sejatinya politik tanpa mahar dapat dilakukan. Sistem yang ditawarkan JOINT telah memungkinkan para pemuda untuk terlibat dalam bidang politik, tidak terkecuali untuk dirinya yang masih belia. Emmy memiliki keyakinan kuat bahwa sistem yang demokratis dapat menjadi sarana bagi pemuda untuk terlibat dan membuktikan diri bahwa pemuda dapat diandalkan (Emmy Yuniarti Rusadi, 16 Februari 2017).

Tidak hanya itu, dengan berpartisipasi dalam JOINT pemuda juga mampu memperkuat keyakinan mereka untuk terlibat dalam bidang politik. Dengan mengikuti proses dalam JOINT, para relawan mendapatkan pengetahuan yang tidak mereka dapatkan sebelumnya. NU dan NNN menunjukkan bahwa mereka merasa cukup beruntung bisa berproses dalam JOINT karena pengalaman dan jaringan yang telah didapatkan. Pengalaman yang telah didapatkan selama berkiprah di JOINT telah berimplikasi pada tertariknya para relawan pada isu-isu politik yang selama ini ia abaikan. Dari sisi proses, bergabung pada JOINT telah memberikan kesempatan NU dan NNN mendapatkan banyak pengetahuan yang dapat menjadi bagian dari cerita yang dapat ditularkan kepada generasi selanjutnya.

Pengalaman di dalam JOINT juga telah memberikan keyakinan bahwa gerakan independen memang bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi wilayahnya. Namun ia melihat bahwa masih ada kekurangan dari berbagai sisi, salah satunya adalah gerakan yang nampak kurang *solid* dan strategi yang perlu dimatangkan. Hal ini ditambahkan oleh AB selaku peneliti yang menilai bahwa gerakan JOINT masih membutuhkan waktu untuk internalisasi nilai kepada masyarakat.

Implikasi Pada Pemikiran Pemuda Pada Bidang Politik

Ketertarikan para pemuda di bidang politik paska mengikuti JOINT secara tidak langsung dapat menstimulus para relawan untuk merumuskan atau memikirkan langkah mereka mendatang. Hal ini nampak pada ungkapan pemikiran NNN yang mengatakan bahwa dirinya kagum dengan apa yang telah terjadi di Kota Yogyakarta, dimana para ahli berkumpul untuk memikirkan masa depan kotanya. Realitas ini tidak terjadi di daerah asalnya yakni di Mojokerto, Jawa Timur. Untuk itu, ia terinspirasi ingin memiliki *caffe* yang dapat dijadikan tempat *nongkrong* para anak muda dan berkontemplasi untuk memajukan wilayahnya (NNN, 31 Maret 2017). Sedangkan Emmy memiliki pemikiran yang sedikit berbeda dengan NNN, dimana ia ingin riset mengawal pembangunan dengan cara senantiasa menjadikan isu *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai fokus analisis (Emmy Yuniarti Rusadi, 16 Februari 2017). Emmy dan NNN merupakan salah satu contoh relawan yang bergabung dengan idealisme dari internal diri. Mereka cenderung memiliki rencana tindak lanjut yang jelas misalnya mendesain ruang dialektika bagi pemuda dan mengadakan berbagai riset untuk mengawal pembangunan.

Temuan lapangan lainnya menunjukkan bahwa tidak sedikit pula para relawan yang bergabung atas adanya faktor eksternal lain, misalnya tugas perkuliahan dan tugas dari dosen. Mereka ternyata memiliki rencana tindak yang berbeda dan memiliki *effort* yang berbeda dengan relawan yang idealis. Jika dilakukan pengamatan dari luar, nampaknya para relawan juga berhenti dalam bertindak. Rata-rata dari mereka cenderung diam karena secara politis kepentingan mereka telah tercapai. Hal ini salah satunya dialami oleh AB, yang mana bergabung dengan gerakan adalah untuk melakukan penelitian sebagai kewajiban akademik yang harus dituntaskan. Sejatinya ia ingin berkontribusi dengan cara memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Namun niatan ini masih dalam batas rencana karena ia tidak memiliki teman perjuangan.

Uraian pada bagian ini telah menunjukkan bahwa para relawan yang telah berproses di dalam JOINT telah mendapatkan pelajaran yang menarik. Meskipun masih dalam batas rencana, namun hal ini akan berimplikasi pada ketahanan politik pemuda selaku bagian dari masyarakat. Para relawan telah mengalami proses dan mampu mengambil pelajaran berharga dalam gerakan independen ini, seperti tidak lagi apatis terhadap politik, hingga ingin melakukan perubahan di masyarakatnya melalui cara mereka masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya bibit *checks and balances* dari para relawan untuk lebih peduli dan melakukan perubahan politik. Di sinilah pengalaman yang didapat melalui gerakan JOINT dapat berkontribusi pada ketahanan politik pada masa mendatang.

Implikasi Pada Langkah Pemuda Dalam Merespon Politik Lokal

Pemaparan pada bagian sebelumnya telah menunjukkan adanya keyakinan dan pemikiran

para pemuda untuk membangun wilayahnya pada masa mendatang. Di samping itu, hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa ada relawan yang memiliki langkah politik yang konkret, baik itu dengan berdialektika dengan *civil society organization* hingga bergabung dalam gerakan politik lainnya. Para relawan tersebut memiliki kesadaran politik yang kuat khususnya dalam mengawal Pilwali 2017. Berbagai pengetahuan yang telah terakumulasi pada diri para relawan telah berpengaruh pada kesadaran relawan pada ranah praksis, hal ini dialami oleh Emmy Yuniarti Rusadi dan Hambar Riyadi.

Kesadaran politik dari Emmy nampak dari kegiatan dan upaya kritik yang disampaikan melalui media sosial. Sedikit berbeda dari Emmy yang menunjukkan kesadaran politiknya melalui berbagai komunitas dan berbagai kritik melalui tulisan, Hambar Riyadi justru mendeklarasikan diri untuk mendukung Imam Priyono. Hambar memang seorang aktivis Anak Wayang Indonesia dan aktif dalam organisasi Laskar Tentara Langit, yang notabene memiliki ideologi nasionalis yang cukup kuat. Ketika pimpinan mendeklarasikan untuk mendukung Imam, Hambar kemudian mengambil sikap politik untuk mendukung Imam. Beliau mengaku tidak anti terhadap politik, karena politik menjadi kendaraan baginya untuk memperbaiki kondisi masyarakat di wilayahnya (Hambar Riyadi, 24 Januari 2017).

Beragam proses yang telah dilalui di dalam JOINT dan diakhiri dengan kegagalan tidak membuat para pemuda merasa putus asa. Para pemuda memilih untuk tetap konsisten berjuang dengan cara yang lain, baik itu memberi kritik melalui *civil society organization* bahkan langsung mendeklarasikan diri mendukung salah

seorang pasangan calon. Realitas yang dialami oleh Emmy dan Hambar menunjukkan adanya kesadaran politik yang senantiasa masih terjaga.

Kesadaran politik menjadi hal yang penting dalam rangka memastikan ada *checks and balances* manakala pemimpin telah terpilih. Aktivitas Emmy melalui organisasi dan diiringi dengan riset terhadap kebijakan tata kota akan menjadi bagian dari *checks and balances* yang muncul dari masyarakat. Sedangkan aktivitas Hambar Riyadi di organisasi Laskar Tentara Langit dapat menjadi sarana untuk agregasi kepentingan masyarakat agar lebih didengar oleh pemimpin. Kedua jalan inilah yang akan berimplikasi pada ketahanan politik pemuda. *Checks and balances* menjadi bagian dari kontrol publik dalam rangka mengawal kebijakan agar berpihak pada masyarakat dan cita-cita nasional. Tanpa adanya *checks and balances*, kepemimpinan lokal dikhawatirkan dapat mengarah pada kesewenang-wenangan yang semakin menjauhkan dari cita-cita nasional.

Implikasi Pada Legitimasi Elite Terpilih Pilwalkot 2017

Kegagalan JOINT dalam mengusung Garin dan Rommy dalam Pilwalkot Kota Yogyakarta tahun 2017 telah berimplikasi pada hanya ada dua pasangan calon dari partai politik yang berkontestasi. Hal ini tentu sangat disayangkan bagi para relawan yang ada di JOINT mengingat hasil akhirnya sangat kontras dengan apa yang diharapkan oleh mereka.

Uraian yang disampaikan oleh AB memperlihatkan bahwa pada dasarnya AB berharap JOINT dapat memutuskan proses yang ada di balik meja antara kandidat dan parpol. AB cukup kecewa dengan walikota

Kota Yogyakarta saat ini. Namun AB coba memahami lebih mendalam bahwa pada dasarnya menjadi pemimpin juga tidaklah mudah karena banyaknya kepentingan yang perlu diperhatikan. Sama halnya dengan AB, NNN juga tidak berharap lebih pada kedua kandidat yang maju dalam Pilwalkot 2017. Isu tata kota yang dibawa justru dianggap kontradiktif dengan capaian mereka selama lima tahun terakhir, mengingat keduanya merupakan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta periode sebelumnya (NNN, 31 Maret 2017). Atas *track record* kedua kandidat yang mengecewakan, NNN juga menilai bahwa isu tata kota yang diusung oleh kandidat tidaklah berarti. Isu ini dinilai hanya menjadi sarana untuk menarik pemilih saja, namun pada dasarnya janji ini tidak dapat diharapkan.

Berberapa uraian di atas menunjukkan bahwa para pemuda relawan JOINT tidak begitu memiliki keyakinan yang kuat pada kandidat. Hal ini disebabkan karena *track record* kandidat selama lima tahun terakhir. Realitas ini dapat mempengaruhi legitimasi pemimpin wilayah, sehingga kelak dapat menimbulkan resistensi. Jika ketahanan politik hanya dilihat dari sudut pandang *state*, adanya deligitimasi dapat menurunkan stabilitas politik. Masyarakat akan cenderung kurang percaya dan lebih resisten terhadap berbagai kebijakan yang dihasilkan. Namun dari sudut pandang *society*, adanya deligitimasi justru dapat memicu masyarakat untuk semakin kritis dan lebih memperhatikan perkembangan wilayahnya. Jikalau masyarakat reaktif, hal ini merupakan bagian dari *checks and balances* dari masyarakat untuk kemajuan wilayahnya. Penelitian ini ingin menekankan pada sisi yang kedua, yakni melihat ketahanan politik dari sisi *society*, sehingga peneliti

dapat mengatakan bahwa meskipun para relawan nampaknya kurang memiliki rasa percaya pada elit terpilih, namun hal ini akan memberikan *impact* pada sisi yang lain, yakni lebih kritis dan lebih jeli dalam melihat perkembangan kota.

Dari penjelasan tersebut di atas kiranya dapat ditegaskan, bahwa para relawan yang telah berproses di JOINT telah berimplikasi pada ketahanan politik baik dari sisi keyakinan, pemikiran, maupun langkah konkret mereka. Dalam ranah individual, secara umum para relawan JOINT telah melalui berbagai proses sehingga mereka telah mengalami perkembangan pola pikir dari yang awalnya nampak apatis terhadap politik kini semakin lebih aktif baik itu dengan mengambil sikap ataupun masih mewacanakan suatu tindakan. Proses ini dapat meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan kontrol sosial. Konkretnya, proses yang telah dilalui dalam JOINT telah mampu menstimulus para relawan untuk lebih kritis dalam mengamati perkembangan wilayahnya, salah satunya dengan melihat pentingnya calon yang independen dan pro masyarakat. Modernisasi pola pikir inilah yang pada akhirnya menstimulus para relawan untuk tetap kritis melalui media, bergabung dalam partai politik, dan bergabung dalam komunitas. Hal inilah yang menjadi unsur pembentuk suatu ketangguhan dalam diri para relawan untuk senantiasa melakukan *checks and balances* pada dinamika politik di sekitar mereka. Tidak hanya itu, sikap para relawan dan rencana yang hendak dilakukan pada masa mendatang juga menjadi bagian ketangguhan yang mendukung ketahanan politik pada masa mendatang. Misalnya keinginan untuk membuat *caffe* dan membentuk komunitas di dalamnya menjadi bagian dari ketangguhan mereka. Sedangkan unsur keuletan nampak

dari sikap para relawan yang ingin tetap mengontrol perubahan setempat, yakni dengan memberikan kritik yang membangun.

Sedangkan dari sisi masyarakat, para relawan telah mencoba melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih kritis dan mendukung gerakan JOINT. Sebagaimana diketahui bahwa gerakan ini memiliki visi dan misi yang mulia untuk membangun Kota Yogyakarta melalui gerakan independen. Meski proses ini kurang berjalan optimal karena faktor strategi, jumlah relawan, dan dukungan dana, namun gerakan ini dapat disikapi sebagai sarana untuk meningkatkan kontrol sosial masyarakat terhadap pemimpinnya. Dengan demikian, gerakan ini telah mendukung terwujudnya ketahanan politik dengan melakukan edukasi kepada masyarakat umum.

Kepingan cerita mengenai para relawan JOINT dan beragam pengalaman yang didapatkan telah memberikan suatu gambaran yang unik. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa para relawan ada yang cenderung diam paska gagalnya gerakan JOINT, namun pada dasarnya mereka memiliki peningkatan keuletan dan ketangguhan dalam diri mereka. Tidak sedikit para relawan yang nampak diam, namun sejatinya mereka memiliki sikap yang cukup kritis dalam diri mereka. Sedangkan tidak sedikit pula para relawan yang telah memiliki sikap nyata untuk merespon perkembangan politik lokal. kedua jenis relawan ini memang memiliki cara yang berbeda untuk mengaktualisasikan diri mereka. Ada wawasan dan pemikiran yang dapat menstimulus kesadaran untuk lebih aktif dapat mendukung ketahanan politik. Keyakinan, pemikiran dan langkah konkret para relawan dapat menjadi bagian dari *checks and balances* sehingga mendukung ketahanan politik pada masa mendatang.

SIMPULAN

Berdasar uraian tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, gerakan independen dengan semangat inklusivitas publik di Kota Yogyakarta mampu membuka peluang bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi, tidak terkecuali untuk pemuda. Mereka mampu terlibat untuk menjadi bakal calon kandidat maupun menjadi relawan gerakan. Dalam proses inilah persepsi dan tindakan politik para pemuda dapat terpotret.

Kedua, optimisme pada awalnya memang membumbung tinggi karena ideologi, visi, dan misi gerakan yang menarik. JOINT dianggap sebagai suatu alternatif langkah yang mampu menghadirkan pemimpin yang independen, tanpa mahar politik. Tujuan yang telah dirumuskan oleh JOINT juga dinilai mulia oleh para pemuda yang masuk dalam gerakan. Namun hal ini kurang diimbangi dengan kuatnya pendanaan dan figur, serta strategi internalisasi ide ke masyarakat luas. Strategi ke atas nampak bagus, namun strategi ke ranah *grassroot* perlu dimatangkan. Berbagai aspek ini perlu diperbaiki oleh gerakan agar mampu menciptakan basis massa yang loyal untuk mendukung langkah mereka.

Ketiga, pemuda dalam gerakan berlabel independen masih belum dapat berpartisipasi secara substantif. Keterlibatan pemuda yang nampaknya hanya dalam hal teknis semata menunjukkan bahwa mereka belum memiliki ruang yang luas untuk mempengaruhi langkah gerakan. Meskipun awalnya diberikan pengantar pentingnya gerakan independen, namun para pemuda justru hanya dilibatkan dalam hal teknis semata. Tidak hanya itu, eksklusivitas tim inisiator dan tim selektor menjadi salah satu hal yang mempersempit akses para pemuda di gerakan.

Keempat, realitas JOINT telah berpengaruh pada ketahanan politik para pemuda. Hal ini nampak dari keyakinan, pemikiran, dan langkah konkretnya paska bergabung dalam gerakan. Pengalaman dan pengetahuan yang mereka dapat telah mengasah kepekaan mereka dalam merespon dinamika politik lokal sekaligus menstimulasi mereka untuk merumuskan langkah apa yang akan diambil pada masa yang akan datang. Keuletan para pemuda nampak dari sikap kritis mereka terhadap pemimpin lokal, sedangkan ketangguhannya nampak dari beragam aksi mereka. Mereka memiliki wacana dan tindakan yang dapat menjadi sarana *checks and balances* dalam suatu sistem politik. Hal ini menjadi bagian dari *feedback* yang diberikan oleh *citizen* kepada pemerintah agar pembangunan ke depan mengarah pada hal yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, K., 2009, *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian Di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: Gramedia dan LSI.
- Aspinall, E. dan van Klinken, G., 2011, *The State and Illegality in Indonesia*, Leiden: KITLV Press.
- Atmasari, Nina, 2014, 'PILPRES 2014 Partisipasi Pemilih di DIY Turun, Ini Penjelasan KPU', diakses pada 1 Maret 2017, <www.solopos.com/2014/07/20/pilpres-2014-partisipaai-pemilih-di-diy-turun-ini-penjelasan-kpu-520646>
- Atsari, A., 2016, Politik Relawan: Kandidasi Calon Perseorangan di Jogja Independent (JOINT), *Naskah Publikasi*: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- BPS, 2015, Indeks Pembangunan Manusia, < <http://yogyakarta.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/5>> (diakses pada 24 Maret 2017)
- Daliyoto, S., 2013, Perubahan Pilihan Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif (Studi Kasus : Perubahan Pilihan Politik Masyarakat Kota Yogyakarta Atas Lima Partai Utama Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004 Dan Pemilu 2009, *Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Easton, D., 1957, "An Approach to the Analysis of Political Systems" dalam *World Politics*, Vol. 9, Np. 3, hal. 383-400.
- Hasanudin, 2016, dalam *harianjogja.com*.
- Meiji, N.H.P., 2015, Pemuda dan Partai politik (Studi Mengenai Latar Belakang dan strategi Anak Muda Untuk Bertahan Serta Membangun Karir Politik Di Dalam Partai PDIP dan PKB Pada Pemilu Legislatif 2014), *Tesis*: Universitas Gadjah Mada.
- Mujani, S., Liddle, W., dan Ambardi, K., 2011, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca*
- PolGov UGM, 2013, Executive Summary Survei Perilaku Pemilih dan Political Linkage, <<http://rumahpemilu.com>> (diakses pada 31 Juli 2015).
- Przeworsky, A., 2000, *Democracy and Development*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ridho, Subkhi, 2016, dalam *Indeksberita.com*.
- Rifai, M., 2012, Hubungan Sinergi Eksekutif dan Legislatif Periode 2004 – 2009 dalam Rangka Optimalisasi Otonomi Daerah Pada Era Reformasi Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi di Kota Bandung Propinsi Jawa Barat), *Tesis*: Universitas Gadjah Mada.

- Robison, R., dan Hadiz, V., 2004, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, London: Routledge Curzon.
- Sationo, T. I., 2010, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mewujudkan Ketahanan Politik Daerah (Studi di DPRD Kabupaten Bantul Periode 2004-2009 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), *Tesis*: Universitas Gadjah Mada.
- Setyawan, A., 2016, Joint, ikhtiar mengusung calon independen di Yogyakarta <<https://beritagar.id/index.php/artikel/laporan-khas/joint-ikhtiar-mengusung-calon-independen-di-yogyakarta>> (diakses pada 23 Juni 2017)
- Slater, D., 2004, “Indonesian’s Accountability Traps: Party Cartels and Presidential Power After Democratic Transition”, dalam *Indonesia 78*, Oktober 2004.
- Suradinata, E., dan Dinuth, A., 2011, *Pemikiran Awal, Pengembangan dan Prospek Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional*, Jakarta: PT. Paradigma Cipta Yatsigama.
- Ula, R., 2012, “Strategi Pemenangan Haryadi Suyuti – Imam Priyono dalam Pemilihan Walikota Yogyakarta 2011”, dalam *Jurnal Politik Muda*, Vol 2 No.1, Januari-Maret 2012, hal 174-184.
- Winters, J.A., 2011, *Oligarchy*, New York: Cambridge University Press.
- Yue, X., 2014, “Collective Actions and the Continuation of Political Resilience: An Explanation of the Languishing Political Transition in China”, *Modern China Studies*, No. 5.

Wawancara

Yustina Neni

Hambar Riyadi

Emmy Yuniarti Rusadi

AB, DT, NU, NNN (nama inisial)